

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rajawali Pers. 2014).
- Arifandy, Imam dan Aslati. “*Pengantar Amdal dan Perspektif Islam*”. (Pekanbaru: UR Press. 2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2012).
- Hendra Wijaya, Made dan Made Emy Andayani Citra. *Hukum Kepariwisataaan*. (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press. 2021).
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013).
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing. 2006).
- Khoidin, M. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: LaksBang Justitia. 2019).
- Maisa, et.al. *Buku Ajar Hukum Sumber Daya Alam*. (Makassar: PT Nas Media Pustaka. 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2005).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002).
- Muhjad, H. M. Hadin. “*Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*”. (Yogyakarta: Genta Publishing. 2015).
- Nurianto. *Hukum Investasi*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2019).
- Pranomo, Bambang Ariyanto. *Sosiologi Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020).
- Raharjo, Mursid. *Memahami Amdal*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Rahma, Mas. *Hukum Investasi*. (Jakarta Timur: Kencana. 2020).

Rizal, Reda. *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL)*. (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 2016).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008).

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996).

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014).

Suparji. *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*. (Jakarta Selatan: UAI Press. 2016).

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007).

Tangian, Diane dan Merryany Theovanny Bawole. *Hukum Bisnis Pariwisata*. (Politeknik Negeri Manado. 2019).

### Artikel Jurnal

Adianto. “Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Dumai”. III. no. 2. (2017).

Adianto. et.al. “Model Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 8. no. 1. (2017).

Akhmaddhian, Suwari. “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)”. *Jurnal Dinamika Hukum* 12. no. 3. (2012).

Al’afghani, Mohamad Mova dan Bisariyadi. “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law”. *Jurnal Konstitusi* 18. no. 1. (2021).

Amir, Nabbilah dan Jerry Watumlawar. “Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Pasca Hadirnya *Omnibuslaw*”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51. no. 1. (2022).

- Anandhyta, Annisya Rakha. "Hubungan Tingkat Partisipasi Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Peisir". *Jurnal Pariwisata Nasional* 12. no. 2. (2020).
- Andhika Kusuma Yadnya, Putu dan I Gusti Ketut Adnyana Wibawa. "Green Tourism Dalam Paradigma Baru Dalam Hukum Kepariwisata". *Majalah Ilmiah Untab* 17. no. 2. (2020).
- Anggriani, Jum. et.al. "Peran Serta Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Desa Di Kabupaten Sleman Yogyakarta". *Selisik* 8. no. 1. (2022).
- Aqmarani, Aliyyah Yustika. et.al. "Sistem Izin Investasi Mudah Dan Terpadu (Si Imut) Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Ideal Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal* 10. no. 2. (2021).
- Aspan, Zulkifli. et.al. "Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara", *Al-Azhar Islamic Law Review* 1. no 1. (2019).
- Ayunda, Rahmi. et.al. "Kebijakan *Online Single Submission* Sebagai *E-Goverment* Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Indonesia". *Journal Of Judicial Review* 23. no. 1. (2021).
- Ayuningtyas, Diah Woro. "Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian". *Jaid* 2. no. 1. (2020).
- Azhara Melisa Ayu dan Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja". *Jurnal Hukum ius Quia Iustum* 30. no. 2. (2023).
- Bahir Mukhammad. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan* 1. no. 2 (2021).
- Bazarah Jamil. et.al. "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)". *Dedikasi* 22. no. 2. (2021).
- Bilal, Muhamad. et.al. "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha". *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4. no. 2. (2021).
- Carlo, Habibie Hendra. et.al. "Analisis Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko". *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 6, no. 2, (2021).

- Ciptaningrum, Yurike Inna Rohmawati. et.al. “Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup”. *Lentera Hukum* 4. no. 1. (2017).
- Chikmawati, Nurul Fajri. “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)”. *ADIL: Jurnal Hukum* 4. no. 21. (2013).
- Darwis, Muhammad. “Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010”. *Jurnal Konstitusi* 15. no. 2. (2018).
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “Penerapan Sistem Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)* di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja”. *Jurnal Komunikasi Hukum* 8. no. 1. (2022).
- Dinar Susanti, Anindita. “Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daratan bagi Perizinan Berusaha”. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14. no. 3. (2021).
- Effendi, H. et.al. “Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya”. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 5. no. 3. (2021).
- Erlianti, Dila. “Kualitas Pelayanan Publik”. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 1. no. 1. (2019).
- Erni dan Febry Jaya. “Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam rangka Kemudahan Berusaha”. *Wajah Hukum* 6. no. 2. (2022).
- Jamal, Fikri. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir”. *Rechtsregel Jurnal Hukum* 2. no. 1 (2019).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido* 01. no. 01. (2019).
- Kasworo, Yerrico. “Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. *Jurnal Rechtvinding* 6. no. 1. (2017).
- Khairi, Mawardi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. *Jatiswara* 35. no. 3. (2020).

- Lestari, Ratna Ani dan S. Agus Santoso. "Pelayanan Publik Dalam *Good Governance*". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* 2. no. 1. (2022).
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya. "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan *Online Single Submission (OSS)*". *Dharmasiswa* 2. no. 3. (2022).
- Marthin Wattimena, Ricky. et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai". *Balobe Law Journal* 1. no. 2. (2021).
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VI. no. 1. 2016.
- Medellu, Sabda Sarah Bunda dan Stephanie Elisandra Lorin Ledo. "Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan". *Jurnal Sapientia et Virtus* 6. no. 1. (2021).
- Meirinawati dan Indah Prabawati. "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui *Citizen's Charter*". *Jurnal Administrasi Publik* 12. no. 1. (2015).
- Mog, Vidly Yeremia Elroy. "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undanvg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Lex Et Societatis* VII. no. 6. (2019).
- Mohas, Muhyi. "Mohamad Fasyehhudin, Pengaruh Pelayanan Perizinan Terhadap Investasi: Kajian *Good Governance* Dan *Good Corporate Governance*". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8. no. 3. (2021).
- Musthafa, Annas Rasid. et.al. "Keabsahan Penggunaan *One Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* Sebagai Sistem Perizinan Berusaha". *Jurnal Legislasi Indonesia* 20. no. 4 (2023).
- Nurainun dan Oki Kustiwa. "Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Pemerintahan Daerah". *Jurnal Sosio-Komunika* 1. no. 1. (2022).
- Nurhayati. et.al. "Implementasi Sistem *Online Single Submission (OSS)* Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang". *J. Paradigma Administrasi Negara* 4. no. 2. (2022).
- Munir, Usman. "Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan". *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13. no 2. (2022).

- Musthafa, Annas Rasid. et.al. "Keabsahan Penggunaan *One Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* Sebagai Sistem Perizinan Berusaha". *Jurnal Legislasi Indonesia* 20. no. 4. (2023).
- Odah. "Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis *Good Governance* Di Jawa Barat". *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pkm Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7. no. 3. (2017).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum DI Indonesia". *Tarbiyah Bil Qolam* VI. no. 1 (2022).
- Palangda, Listriyanti. et.al. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik". *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 1. no. 2. (2020).
- Purgianto, Melisa. "Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha". *Lex Privatum* XII, no. 1. (2023).
- RAS, Hernawati dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui *Omnibus Law*". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4. no.1. (2020).
- Restu Pratiwi, Annistaesia. et.al. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pengelolaan Pariwisata Danau Kerinci". *Mendapo: Journal of Administration Law* 3. no. 2.
- Riyadi, Fuad dan Faiqul Riyan Anggara. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11. no. 1. (2020).
- Rohendi, Acep. "Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1. no 2. (2014).
- Romi, Implementasi. "*Good Governance* Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 2. no. 2.
- Rosyada, Ayu Amrina. "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda". *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 4. no. 1. (2016).
- Rukayat, Yayat. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu". *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia)* XI. no.2. (2017).

- Rumkel, Lutfi. et.al. “Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Perijinan Tentang Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Lentera* 2. no. 2. (2020).
- Samad, Rezki Purnama. et.al. “Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir”. *Al-Ishlah* 24. no. 1. (2021).
- Sandang, Yesaya. “Pengarutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia”. *Jurnal HAM* 10. no. 1. (2019).
- Santoso, Hari Agus. “Efektivitas UU Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi”, *Jurnal Hukum Positum* 6. no. 2. (2021).
- Sari, Dewi Puspita. et.al. “Inovasi Pelayanan Perizinan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar”. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6. no. 2. (2013).
- Sihombing, Adam Jose dan Sudiarawan, Kadek Agus. “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar”. *Jurnal Kertha Negara* 8. no. 11. (2020).
- Sihotang, Jus Samuel. “Good Governance Dalam Pelayanan Publik”. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1. no. 2. (2023).
- Simbiak, Irja Tobawan. “Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab”. *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan (JWIKAL)* 1. no. 1. (2022).
- Sudjati Winata, Agung, “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2. no. 2. (2018).
- Suhartoyo. “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”. *Administrative Law & Governance Journal* 2. no. 1. (2019).
- Suharyana, Yana. “Implementasi E-government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten”. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1. no. 1(2017).
- Sukananda, Satria dan Danang Adi Nugraha. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1. no.2. (2020).

Tompo, Mukhtar. et.al. “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto”. *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 3. no. 1. (2021).

Tri Tjitrawat, Aktieva. et.al. “Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata”. *Media Iuris* 5. no. 1. (2022).

Ubaiyana dan Akhmad Haris Supriyanto. “Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. *Negara Hukum* 13. no. 1. (2022).

Ubaiyana dan Kristina Viri. “Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 19. no. 1. (2022).

Winata, Agung Sudjati. “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2. no. 2. (2018).

Wulandari, Andi Sri Rezky. et.al. “Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia”. *Jurnal Gema Keadilan* 10. no. 1 (2023).

Wulandari, Sintiya Karina dan Muammar Alay Idrus. “Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup)”. *JURIDICA* 5. no. 1. (2023).

Yakin, Sumadi Kamarol. “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”. *Badamai Law Journal* 2. no. 1. (2017).

Zahro, Nur Eka Fatimatuz dan Achmad Hasan Basri. “Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1. no. 1 (2023).

Zulkarnain, Cut Sabina Anasya. “Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Amdal di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Sistem Elektronik”. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2. no. 1. (2020).

## **Hasil Wawancara**

Wawancara bersama Ali Fauzi selaku Hubungan Masyarakat PT Island Connections Belitung.

Wawancara bersama Bagus Hariadi Wonoasmoro selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Safitri, Myrna A dan Norma Asyifah. “Kendali Rencana Di Ruang Kota: Studi Tentang Peran Audit Tata Ruang Dalam Penegakan Hukum Tata Ruang Di Kawasan Perkotaan”. Laporan Penelitian Internal Dosen. (Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2021).

Putra Juanda, Reza. “Persetujuan Lingkungan Sebagai Model Perizinan Usaha Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Skripsi. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2022).

Petrus. “Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Lingkungan”. Tesis. (Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. 2022).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

### **Internet**

Adyahardiyanto, Adhityo. “Terbaru! Ini Skema Persetujuan Lingkungan Integrasi Amdalnet dengan OSS-RBA”. <https://prolegal.id/terbaru-ini-skema-persetujuan-lingkungan-integrasi-amdalnet-dengan-oss-rba/>.

Amdalnet. “Daftar Instansi LH Yang Telah Teregistrasi Di Amdalnet”. <https://amdalnet.menlhk.go.id/>.

Apriyandi, Ryan. “5 Perbedaan KKPR dan PKKPR”. <https://prolegal.id>.

Astuti, Endang dan Eko Sugiarto. “Amdal Berdasarkan PP 22 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. [https://www.academia.edu/86952176/Amdal\\_Berdasarkan\\_PP\\_22\\_2021\\_tentang\\_Penyelenggaraan\\_Perlindungan\\_dan\\_Pengelolaan\\_Lingkungan](https://www.academia.edu/86952176/Amdal_Berdasarkan_PP_22_2021_tentang_Penyelenggaraan_Perlindungan_dan_Pengelolaan_Lingkungan).

Ayu Lisia. “Gubernur Bangka Belitung Tekankan Komunikasi Intens Terkait Investasi PT ICB”. [https://bangka.tribunnews.com/2020/11/12/gubernur-bangka-belitung-tekanan-komunikasi-intens-terkait-investasi-pt-icb#google\\_vignette](https://bangka.tribunnews.com/2020/11/12/gubernur-bangka-belitung-tekanan-komunikasi-intens-terkait-investasi-pt-icb#google_vignette).

AP, Khanza. “Amdal Berdasarkan PP 22 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”.

[https://www.academia.edu/86952176/Amdal\\_Berdasarkan\\_PP\\_22\\_2021\\_tentang\\_Penyelenggaraan\\_Perlindungan\\_dan\\_Pengelolaan\\_Lingkungan](https://www.academia.edu/86952176/Amdal_Berdasarkan_PP_22_2021_tentang_Penyelenggaraan_Perlindungan_dan_Pengelolaan_Lingkungan).

Bima Shabartum Group. “Konsultasi Publik Pada Penyusun dan Penilai Amdal”.  
<https://bimashabartum.co.id/konsultasi-publik-pada-penyusunan-dan-penilaian-amdal/>.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. “Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Amdal”.  
<https://dlh.karanganyarkab.go.id/2013/10/26/tata-cara-pengikutsertaan-masyarakat-dalam-proses-amdal/>.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. “Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.  
<https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/25912-kebijakan-pemanfaatan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kaitannya-dengan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. “Tak Hanya Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi Wajib Miliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut”.  
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/37398-tak-hanya-pelaku-usaha-perguruan-tinggi-wajib-miliki-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-laut>.

Ensiklopedia Dunia. “Pulau Anak Kalimantan”.  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pulau\\_Anak\\_Kalimambang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pulau_Anak_Kalimambang).

Fadilah, Mochamad. “Hak Dan Kewajiban Dalam Penanaman Modal Asing: Simak Ulasan Lengkapnya Disini!”.  
<https://yuklegal.com/hak-dan-kewajiban-dalam-penanaman-modal-asing/>.

Greenpermit.id. “Perizinan Berusaha Berbasis Resiko: Tingkat Resiko dan Cara Membuat”.  
<https://greenpermit.id/2022/08/25/perizinan-berusaha-berbasis-risiko/>.

Harahap, Reza. “Contoh Kegiatan Wajib AMDAL dan SPPL”.  
[https://www.ukmsumut.com/usaha-wajib-amdal-sppl/#Pengelompokan\\_AMDAL](https://www.ukmsumut.com/usaha-wajib-amdal-sppl/#Pengelompokan_AMDAL).

Hukum Online.com. “Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Begini Penjelasannya”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjasannya-lt60741b4e30518#!>.

InCorp Editorial Team. “Mengenal Kategori AMDAL Untuk Bisnis Di Indonesia (Update 2024)”.  
<https://www.cekindo.com/id/blog/amdal-indonesia-update-2019#10-apa-saja-kategori-amdal>.

Kementerian Investasi/BKPM, “Persyaratan Dasar”, <https://oss.go.id>.

Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/11/investasi-asing-di-pulau-pulau-kecil-didorong>.

Learning Hukum Online. “Transisi Sistem OSS 1.0 Ke Sistem OSS 1.1”. <https://learing.hukumonline.com>.

Legalitas.org. “Mengenal Risiko Di OSS”, <https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>”.

Noverika, Epieta. “Sistem OSS”. <https://dpmtsp.babelprov.go.id/node/1106>.

Permatasari, Erizka. “Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Begini Penjelasanannya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasanannya-lt60741b4e30518#!>.

PPID KLHK. “AMDAL Untuk Persetujuan Lingkungan”. <https://ppid.menlhk.go.id/>.

PPID KLHK. “Integrasi OSS-RBA Dengan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet Untuk Persetujuan Lingkungan”. <https://amdalnet.menlhk.go.id/#/home/materi>.

PPID KLHK. “KLHK Gelar Rakernas AMDAL Untuk Bangun Sinergi Transformasi Persetujuan Lingkungan”. <https://ppid.menlhk.go.id/>.

PPID KLHK. “Percepatan Layanan Persetujuan Lingkungan. KLHK Luncurkan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet”. <https://ppid.menlhk.go.id/>.

Rizki, Mochammad Januar. “Melihat Poin Penting PP Izin Usaha Berbasis Resiko”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-poin-penting-pp-izin-usaha-berbasis-risiko-lt6033347523f05?page=2>.

Rohma, Siti. “Perbedaan Formulir Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL Pada Dokumen Amdal Kegiatan Pertambangan”. <https://bimashabartum.co.id/>.

Rohma, Siti. “Konsultasi Publik Pada Penyusunan Dan Penilaian amdal, <https://bimashabartum.co.id/>.

Wikipedia. “Pulau Anak Kalimantan”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Anak\\_Kalimambang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Anak_Kalimambang).

Yazid, Faiz Azhanzi. “Mengetahui RKL-RPL, Unsur Penting dalam Dokumen Amdal”. <https://prolegal.id/mengenal-rkl-rpl-unsur-penting-dalam-dokumen-amdal/>.

### **Lain-Lain**

Berita Acara Konsultasi Publik Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Usaha/Kegiatan Wisata Bahari PT Island Connections Belitung 19 November 2022.

Formulir Kerangka Acuan PT Island Connections Belitung Rencana Usaha/Kegiatan Resort Bintang 5 dan Wisata Bahari di Pulau Kalimantan Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Undangan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Usaha/Kegiatan Wisata Bahari PT Island Connections Belitung 19 November 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Keputusan**

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang merupakan Kewenangan Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian teknis Lingkup kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Surat Edaran**

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SE-I/PKTL/PDLUK/PL.6.2/B/03/2024 tentang Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko OSS-RBA dengan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet untuk Persetujuan Lingkungan.